

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik mempunyai tugas utama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan menimbulkan hubungan pertanggungjawaban, sehingga pemerintah harus mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan kinerjanya kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat sendiri mempunyai peran sebagai pemberi dana (*public fund*) kepada pemerintah. Keberhasilan pemerintah sebagai organisasi sektor publik akan dinilai dari kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas pemerintah.

Akuntabilitas dari pemerintah merupakan salah satu indikasi tegaknya perekonomian suatu negara. Pemerintah yang akuntabel merupakan pemerintah yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban tertulis berupa penyajian laporan keuangan atas kinerja yang telah dicapai, pemerintah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik.

Setiap entitas, termasuk pemerintah daerah, wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD). Terlebih Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi, yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Akuntansi Keuangan Pemerintahan sekarang memasuki Era Desentralisasi, maka pelaksanaan akuntansi pemerintahan itu ada di daerah-daerah (Provinsi ataupun Kabupaten), kemudian daerah-daerah tersebut menyampaikan laporannya ke Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat dibuatkan menjadi Laporan Konsolidasi yang merupakan Laporan Keuangan Pemerintah RI. Akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem informasi pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, mengikhtisarkan dan mengkomunikasikan kegiatan suatu daerah berupa pelaporan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi keuangan daerah terdiri atas:

1. Akuntansi keuangan pemerintahan Provinsi,
2. Akuntansi keuangan pemerintahan Kabupaten.

Menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat 7 komponen Laporan Keuangan yang salah satunya adalah neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Informasi yang dapat diperoleh dari format laporan keuangan berupa neraca antara lain :

- a. Informasi keuangan berupa kondisi aset lancar, seperti : kas, piutang, persediaan yang mempunyai masa manfaat dalam periode 12 bulan atau 1 tahun mendatang.
- b. Informasi keuangan tentang investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang yang memberikan informasi manfaat yang akan diperoleh pada periode 12 bulan berikutnya (investasi jangka pendek) maupun manfaat tahun-tahun selanjutnya (investasi jangka panjang).
- c. Informasi keuangan tentang kondisi aset tetap, yang mempunyai manfaat ekonomis bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada masa mendatang.
- d. Informasi keuangan tentang beban kewajiban yang harus diselesaikan pada periode jangka pendek maupun jangka panjang (lebih dari 1 tahun).
- e. Informasi keuangan berupa ekuitas daerah yang mencerminkan nilai kekayaan bersih daerah pada tanggal neraca disusun.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara, negara sebagai prinsipal menunjuk BPK untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban berupa laporan

keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah, sehingga negara dalam hal ini masyarakat sebagai prinsipal memperoleh keyakinan kebenaran atas laporan yang disusun sehinggadapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu hasil pemeriksaan BPK yaitu opini pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat sebagai alat ukur penilaian kinerja pengelolaan keuangan negara maupun daerah.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2017, BPK memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Dalam artikel Pelopor Media Online NTT juga, terdapat hasil penemuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2019 tentang pengelolaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang belum tertib. Namun dalam artikel tidak dijelaskan secara detail masalah dari pengelolaan kas tersebut.

Opini pemeriksaan sering dijadikan sebagai pengukuran kinerja suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya yang bersifat eksternal. Penelitian yang dilakukanVirgasari (2006) menyatakan bahwa opini pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana semakin baik opini yang diperoleh pemerintah daerah maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah tersebut dan semakin buruk opini yang yang diperoleh pemerintah daerah maka semakin buruk pula kinerja pemerintah daerah. Penelitian lain yang meneliti pengaruh opini terhadap kinerja pemerintah daerah juga dilakukan oleh Marfiana (2013)yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara opini pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dari hasil penemuan BPK yang memberikan opini WDP dan pengelolaan kas Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang tidak tertib. Opini BPK tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dimana dalam penelitian Virgasari (2006) menyatakan bahwa semakin baik opini yang diperoleh maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dan semakin buruk opini yang yang diperoleh pemerintah daerah maka semakin buruk pula kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian masalah di atas, membuat peneliti tertarik untuk meneliti Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan. Dengan demikian penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana Dalam Laporan Keuangan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dilihat dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana yang diukur menggunakan Analisis Pertumbuhan Aset, Rasio Solvabilitas, Rasio Likuiditas dan Rasio Utang Tahun 2017-2019?

1.3.Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dilihat dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana yang diukur

menggunakan Analisis Pertumbuhan Aset, Rasio Solvabilitas, Rasio Utang dan Rasio Likuiditas Tahun 2017-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai aplikasi dari teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam perusahaan atau lembaga, serta untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam bidang ekonomi Akuntansi.

2. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan pemikiran bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utaramengenai kinerja keuangan mereka, apakah sudah baik atau sehat apabila dilihat dari rasio- rasio keuanganya.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.